

## Analisis karakteristik dan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali

Ni Luh Jaya Anggreni<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Putu Dharmayasa<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia

\*Corresponding authors: [ngurahdharmayasa@undiknas.ac.id](mailto:ngurahdharmayasa@undiknas.ac.id)

Submitted: 9 February 2024, Revised: 17 June 2024, Accepted: 22 June 2024

**ABSTRACT:** Rapid population growth leads to the expansion of residential areas, increasing the demand for land. Unpreparedness in anticipating the speed and dynamics of urban growth can result in the emergence of slum settlements. This study focuses on the settlements in Pengambengan Village, Jembrana Regency, Bali, which are predominantly inhabited by fishermen and are considered to be slums. If the growth of these slum settlements is not controlled, the environmental quality will continue to decline as these settlements expand. Therefore, it is crucial to understand the characteristics of these settlements. To understand the characteristics of these slum settlements, it is crucial to examine their features. Through this research, an analysis will be conducted to determine the characteristics of the slum settlement in Pengambengan. This study employed a mixed-method approach, combining data collection through observation and interviews, as well as data collection from various sources to complement existing survey results. The collected data was then analyzed and assessed based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 14/PRT/M/2018. The results of the analysis, which align with the 7 slum conditions including building structures, roads, water supply, drainage system, wastewater management, waste management, and fire protection, yielded a total score of 18. This indicates that the residential in Pengambengan is at a mild level of slum conditions. Despite being relatively low in slum severity, two important aspects should be noted—the provision of qualified drinking water and awareness of fire hazards, as these could have severe consequences for the residents of Pengambengan.

**KEYWORDS:** characteristics of slums; fishing village; Pengambengan Village; settlements; slums.

**ABSTRAK:** Seiring pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, kawasan permukiman pastinya akan mengalami perluasan. Hal ini menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman juga semakin meningkat. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan kawasan permukiman dapat menimbulkan tumbuhnya permukiman kumuh. Kondisi pemukiman yang perlu mendapat perhatian adalah di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, karena pemukiman di desa ini didominasi oleh pemukiman nelayan yang cenderung kumuh. Jika pemukiman kumuh ini tidak dikendalikan pertumbuhannya, maka kualitas lingkungan akan terus menurun sejalan dengan meluasnya pemukiman kumuh ini. Untuk memahami kondisi pemukiman kumuh ini, maka karakteristiknya sangat penting diketahui. Melalui penelitian ini dapat dianalisis karakteristik permukiman kumuh di Desa Pengambengan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan berbagai sumber terkait untuk melengkapi hasil survei yang sudah ada. Data dianalisis dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa Desa Pengambengan memiliki tingkat kekumuhan ringan dengan nilai total 18. Meskipun tingkat kekumuhannya rendah, dua hal penting perlu diperhatikan yaitu penting untuk memastikan akses terhadap air minum yang bersih dan aman bagi warga dan perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran karena dapat berakibat fatal bagi warga.

**KATA KUNCI:** karakteristik kekumuhan; desa nelayan; Desa Pengambengan; permukiman; kumuh.

© The Author(s) 2024. This article is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

### 1 PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang ditegaskan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tempat tinggal dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa yang utuh, berjati diri, mandiri, dan produktif (Hadian et al., 2022). Oleh karena itu,

kebutuhan tempat tinggal yang layak sangat penting untuk diperhatikan.

Dasar hukum yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan hak warga negara atas tempat tinggal yang layak. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian bermukim bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyelenggaraan kawasan permukiman

menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan hak tersebut (Perkim.id, 2020).

Kondisi permukiman yang menarik untuk ditinjau adalah permukiman nelayan di Desa Pengambengan yang terletak di kawasan pesisir Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Sebagai desa pesisir atau desa nelayan dengan sektor perikanan sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat juga mempengaruhi perkembangan permukiman. Selama ini, berdasarkan beberapa penelitian, pemukiman nelayan di beberapa daerah di Indonesia berkembang ke arah pemukiman kumuh (Anwar & Wahyuni, 2019; Dimitra & Yuliastuti, 2012). Hal yang sama juga telah terjadi di Desa Pengambengan sebagai desa nelayan yang perkembangan pemukimannya pesat, memerlukan perhatian karena mengarah ke kawasan kumuh (Shara, 2018). Penelitian tentang identifikasi tingkat kekumuhan di daerah pemukiman nelayan di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana belum pernah dilakukan, sehingga sangat relevan dilakukan. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran nyata tingkat kekumuhan di Desa Pengambengan.

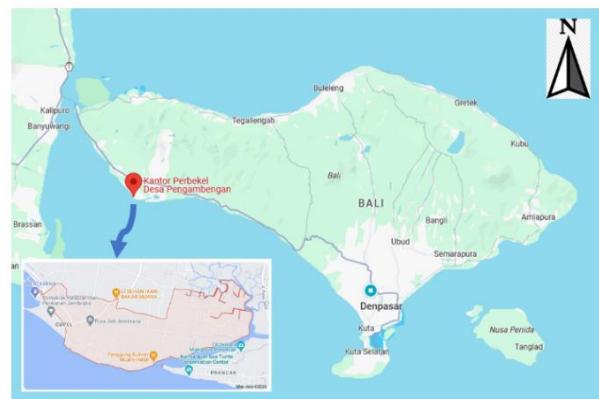
Kawasan kumuh muncul akibat tidak meratanya pembangunan, yang mengakibatkan terbentuknya kantong-kantong perumahan yang terisolasi dari infrastruktur dan prasarana lingkungan di sekitarnya. Faktor lain yang berkontribusi adalah pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Alfian & Akbar, 2020; Koterisa et al., 2018). Permukiman kumuh adalah pemukiman dengan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan (Ervianto & Felasari, 2019; Jaswadi et al., 2019). Definisi lainnya menyebutkan bahwa pemukiman kumuh adalah perumahan yang kualitasnya rendah, sehingga tidak layak sebagai tempat hunian (Kementerian PUPR, 2018).

Untuk mengatasi kekumuhan yang ada, sangat penting dilakukan identifikasi karakteristik dan tingkat kekumuhan di Desa Pengambengan. Melalui penelitian ini akan dapat diketahui secara spesifik aspek-aspek apa saja yang menyebabkan terjadinya kekumuhan. Melalui identifikasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kebijakan untuk dapat mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah yang menyebabkan kekumuhan tersebut dengan tepat.

## 2 METODOLOGI

### 2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi tentang identifikasi permukiman kumuh ini adalah Desa Pengambengan, di Kabupaten Jembrana, Bali (Gambar 1). Desa Pengambengan secara fotografi terletak pada dataran rendah dengan memiliki permukaan yang relatif datar dengan luas wilayah 10.3 km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Jembrana, 2021). Sedangkan wilayah pemukiman di Desa Pengambengan dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 1.** Lokasi Penelitian  
(Google Earth, 2023)



**Gambar 2.** Kawasan permukiman di Desa Pengambengan

### 2.2 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari survei dan wawancara pada masyarakat di kawasan permukiman di Desa Pengambengan. Selain data primer ini juga di dukung melalui data-data pendukung berupa laporan penelitian serta dokumen terkait yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 2.3 Analisis Data

Dalam analisis data mengenai permukiman Desa Pengambengan dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dan pembobotan (*scoring*). Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menginterpretasikan suatu hal secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada (Zellatifanny & Mudjianto, 2018). Fakta-fakta di lapangan tersebut, melalui analisis ini akan dapat dideskripsikan secara kuantitatif dalam bentuk suatu nilai atau bobot dari variable-variabel atau karakteristik yang diteliti.

Pembobotan dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat menentukan tingkat kekumuhan yang tepat

sesuai dengan kondisi wilayah studi. Metode pembobotan ini digunakan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan hasil wawancara dan survei (Sudipa & Sri Aryati, 2019). Pembobotan atau nilai yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2018 pada lampiran 2 (Sunarto & Pangestu, 2022). Nilai total kekumuhan adalah dengan menjumlahkan hasil perhitungan numerik meliputi 7 kondisi dan 16 kriteria.

Ketujuh kondisi atau variable untuk menilai tingkat kekumuhan tersebut adalah: (1). aspek bangunan gedung, (2). aspek jalan lingkungan, (3). aspek penyediaan air minum, (4). drainase lingkungan, (5). pengelolaan air limbah, (6). pengelolaan persampahan, (7). dan pencegahan bahaya kebakaran (Ardani, 2022; Arief et al., 2021; Asyfa et al., 2021) yang dijelaskan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Aspek penilaian kekumuhan daerah permukiman

	Kondisi	Kriteria
1	Kondisi Bangunan Gedung	1 Ketidakteraturan bangunan
		2 Kepadatan bangunan
		3 Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	4 Cakupan pelayanan jalan lingkungan
		5 Kualitas permukaan jalan lingkungan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	6 Ketersediaan akses aman air minum
		7 Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4	Kondisi Drainase Lingkungan	8 Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air
		9 Ketidaktersediaan drainase
		10 Kualitas konstruksi drainase
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	11 Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		12 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
		13 Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	14 Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		15 Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	16 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

*Sumber: Kementerian PUPR, 2018*

Selanjutnya hasil dari pembobotan atau penilaian dari ke-7 kondisi dan ke-16 kriteria di atas dicocokkan dengan peraturan menteri tersebut, sehingga diketahui tingkat kekumuhan di suatu wilayah. Nilai kekumuhan selanjutnya dirangkum dalam Tabel 2 berikut ini (Kementerian PUPR, 2022).

**Tabel 2.** Nilai untuk penentuan tingkatan kekumuhan

Total Nilai	Keterangan
60-80	Tingkat Berat
38-59	Tingkat Sedang
16-37	Tingkat Ringan

*Sumber: Kementerian PUPR, 2022*

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Karakteristik Kekumuhan Kawasan Permukiman di Desa Pengambengan

##### 3.1.1 Kondisi bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung ditinjau berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dalam RDTR diatur secara detail mengenai penataan wilayah suatu kota/ kabupaten serta zonasinya (Putung & Perdana, 2019), sedangkan dalam RTBL diatur mengenai bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona (Kementerian PU, 2007).

Ditinjau dari tingkat keteraturan bangunan gedung, terdapat 546 rumah dari total 2,049 rumah atau 26.65% yang kondisinya tidak teratur dilihat dari kriteria ketentuan tata bangunan. Dengan persentase di atas, maka untuk kriteria ketidakteraturan bangunan menperoleh nilai 1.

Luas pemukiman Desa Pengambengan sebesar 61.17 ha dengan jumlah bangunan 2,049 unit rumah, sehingga kepadatan bangunan di daerah ini adalah 33.50 unit/ha. Luas wilayah yang dikategorikan padat adalah 20.80 ha atau 34% dari luas pemukiman. Wilayah di atas dikategorikan padat dilihat dari kondisi jalan yang sangat sempit (1-1,5 m) dan jarak antar rumah yang sangat dekat (0.5-2 m), bahkan ada juga rumah warga tidak berjarak (Apriliani et al., 2022). Kriteria kepadatan bangunan ini berdasarkan persentase luas wilayah yang padat penduduk memiliki nilai 1.

Sedangkan untuk kriteria yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan, ada 101 unit dari 2,049 rumah dengan persentase 4.93% yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Sesuai dengan persentase di atas maka kriteria ini memiliki nilai 0. Total nilai untuk kondisi bangunan gedung adalah 2.

Berikut ini nilai karakteristik permukiman berdasarkan kondisi kondisi bangunan yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Nilai kondisi kondisi bangunan gedung

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Ketidakteraturan bangunan	26.65	1
Kepadatan bangunan	34.00	1
Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	4.93	0
Rata- Rata	21.86	

**Gambar 3.** Kondisi bangunan pada kawasan permukiman di Desa Pengambengan

### 3.1.2 Kondisi jalan lingkungan

Kondisi jalan di Desa Pengambengan meskipun tergolong sempit dan bahkan masih ada jalan yang perkerasannya dari tanah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, tetapi seluruh wilayah pemukiman telah dilayani oleh jalan yaitu sepanjang 12,754.86 m. Sehingga dari kriteria pelayanan jalan nilai kekumuhan mendapatkan nilai 0. Dari total panjang jalan tersebut hanya terdapat 2,884.41 m (22.61%) yang mengalami kerusakan, sehingga kriteria ini mendapat nilai 0. Total nilai untuk kondisi jalan lingkungan adalah 0.

Nilai untuk setiap kriteria kondisi jalan lingkungan ditampilkan pada Tabel 4.

**Gambar 4.** Kondisi perkerasan jalan lingkungan pada kawasan permukiman di Desa Pengambengan**Tabel 4.** Nilai kondisi jalan lingkungan

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Cakupan jalan lingkungan	0	0
Kualitas permukaan jalan lingkungan	22.61	0
Rata-Rata	11.31	

### 3.1.3 Kondisi penyediaan air minum

Ketersediaan akses aman air minum di kawasan permukiman di Desa Pengambengan tergolong cukup rendah, dari 1,944 KK sejumlah 1,941 KK (99.85%) tidak aman, karena tidak memenuhi kualitas air minum yang layak. Untuk kriteria akses aman air minum ini dapat diberikan nilai 5. Sedangkan untuk pemenuhan air minum seluruh warga dapat mengakses atau terpenuhi kebutuhan air minumnya, sehingga dinilai 0. Untuk nilai total kondisi ini adalah 5 dan dapat dilihat pada Tabel 5 untuk setiap kriteria.

**Tabel 5.** Nilai kondisi penyediaan air minum

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Tidak terakses aman air minum	99.85	5
Tidak terpenuhi kebutuhan air minum	0	0
Rata- Rata	49.92	

### 3.1.4 Kondisi drainase lingkungan

Sistem drainase sangat berperan penting bagi sanitasi lingkungan karena sebagai saluran untuk membuang kelebihan air hujan yang akan menyebabkan genangan (Muhammad & Yunus, 2018; Surya et al., 2018). Penyebab saluran drainase pada permukiman ini tidak berfungsi dengan baik dan optimal sesuai dengan standar teknis karena saluran drainase ini banyak yang tertutup sampah, sehingga pada saat musim hujan cenderung terjadi genangan. Kondisi sistem drainase juga kurang baik karena di beberapa titik di kawasan permukiman juga tidak tersedia saluran drainase. Dari luasan kawasan penelitian sebesar 61.17 ha, terdapat kawasan dengan luasan 29.24 Ha (47.80%) yang mengalami genangan karena air limpasan tidak mampu mengalir dengan baik, sehingga kriteria ini mendapat nilai 1. Saluran drainase yang tersedia saat ini adalah 8,230.31 m (43.76%) dari panjang ideal drainase 18,809.40 m dan untuk kriteria ini mendapat nilai 1. Untuk kualitas konstruksi drainase masih baik sehingga dinilai 0. Nilai total untuk kondisi drainase lingkungan adalah 2. Rangkuman penilaian untuk kondisi kondisi drainase lingkungan dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Nilai kondisi drainase lingkungan

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	47.80	1
Ketersediaan drainase	43.76	1
Kualitas konstruksi drainase	0.00	0
Rata- Rata	30.52	

### 3.1.5 Kondisi pengelolaan air limbah

Sistem pengolahan air limbah di Desa Pengambengan tergolong cukup baik, karena setiap rumah tangga atau setiap KK telah memiliki jamban dan sistem pengolahan air limbah yang baik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Sehingga kedua kriteria ini mendapat nilai 0. Nilai total untuk kondisi pengelolaan air limbah adalah 0 dan untuk setiap kriteria dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Nilai kondisi pengelolaan air limbah

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	0.00	0
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	0.00	0
Rata- Rata	0.00	

### 3.1.6 Kondisi pengelolaan persampahan

Penanganan persampahan di Desa Pengambengan kurang mendapat perhatian, sehingga sampah tidak dikelola dengan baik. Masyarakat membuang sampah langsung ke saluran drainase ataupun membakar sampah langsung di tegalan. Terdapat 727 KK (37.40%) dari 1944 KK yang pengelolaan sampahnya tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan untuk kriteria ini mendapat dinilai 1. Untuk prasarana dan sarana persampahan sendiri sudah sesuai dengan persyaratan teknis sehingga dinilai 0. Nilai total dari kondisi pengelolaan persampahan di Desa Pengambengan adalah 1 dan untuk setiap kriteria dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Nilai kondisi pengelolaan persampahan

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis	0.00	0
Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	37.40	1
Rata- Rata	18.70	

Sistem pengelolaan persampahan di Desa Pengambengan yang kurang memadai dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 5.** Pengelolaan sampah yang tidak memadai di kawasan permukiman di Desa Pengambengan

### 3.1.7 Kondisi proteksi bahaya kebakaran

Dalam upaya mencegah bahaya kebakaran di Desa Pengambengan, setiap rumah tidak menyediakan alat pencegahan kebakaran, lebar jalan pun kurang memungkinkan untuk kendaraan pemadam kebakaran dapat mencapai lokasi kebakaran. Kondisi rumah rata-rata dari kayu dan memiliki jarak yang cukup berdekatan sehingga dapat memicu kebakaran mudah menjalar. Sebanyak 1,475 rumah dari total 2,049 rumah yang tidak tersedia prasarana pencegahan kebakaran atau 71.99% sehingga mendapat nilai 3. Kemudian terdapat 1,944 rumah dari total 2,049 rumah yang tidak tersedia sarana pencegah kebakaran dengan persentase 94.88%, sehingga mendapat nilai 5. Berikut ini kondisi pencegahan bahaya kebakaran di Desa Pengambengan yang dapat dilihat pada Tabel 9 dengan total nilai untuk kriteria ini adalah 8.

**Tabel 9.** Nilai kondisi pencegahan bahaya kebakaran

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Ketersediaan prasarana pencegah kebakaran	71.99	3
Ketersediaan sarana pencegah kebakaran	94.88	5
Total Rata- Rata	83.43	

### 3.2 Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Desa Pengambengan

Untuk menghitung tingkat kekumuhan dilakukan perhitungan berdasarkan kriteria dari 7 kondisi yang ditinjau. Sesuai dengan setiap nilai yang diperoleh, setelah dijumlahkan hasilnya, maka akan diperoleh tingkat kekumuhan yang ada di Desa Pengambengan.

Adapun hasil dari analisis diperoleh kesimpulan yang dirangkum pada Tabel 10 dan Gambar 5.

**Tabel 10.** Nilai pembobotan kekumuhan untuk Desa Pengambengan

Kriteria	Percentase (%)	Nilai
Bangunan gedung	21.86	2
Jalan lingkungan	11.31	0
Penyediaan air minum	49.92	5
Drainase lingkungan	30.52	2
Pengelolaan air limbah	0.00	0
Pengelolaan persampahan	18.70	1
Proteksi kebakaran	83.43	8
Total		18



**Gambar 6.** Tingkat kekumuhan untuk kawasan permukiman di Desa Pengambengan

### 3.3 Analisis Internal Rate of Return

IRR merupakan bagian dari salah satu indikator dari investasi dapat diterima atau tidak. Nilai MARR nya adalah 8% dengan waktu investasi selama 19 tahun diperoleh IRR sebesar 12.88 %. Dengan nilai tersebut bahwa IRR dinyatakan lebih besar dari nilai MARR sehingga investasi dapat dilanjutkan. Arus kas dengan suku bunga 12% dan 13% dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Berdasarkan perhitungan identifikasi tingkat kekumuhan, maka didapatkan nilai 18 sehingga, tingkat kekumuhan untuk Desa Pengambengan tergolong kumuh ringan (Akbar & Novira, 2019; Elja et al., 2023). Melalui identifikasi ini, maka akan dapat

direncanakan penanganan darah kumuh dengan lebih terarah sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat (Putri et al., 2023).

## 4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kekumuhan antara lain: (1) jarak bangunan yang sangat dekat atau berhimpitan, (2) kondisi akses air minum yang tidak aman, (3) sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik karena tertutup oleh sampah, (4) pengelolaan sampah yang tidak memadai dan (5) yang tertinggi adalah tidak adanya sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran. Dengan kondisi di atas maka bobot nilai kekumuhan adalah 18 yaitu pemukiman dengan tingkat kekumuhan ringan.

Meskipun tingkat kekumuhan relatif rendah, tetapi penyediaan air minum yang memenuhi syarat perlu diperhatikan untuk kesehatan warga. Selain itu dilihat dari segi keamanan, maka permukiman di Desa Pengambengan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran dan akan berakibat sangat fatal jika terjadi bencana kebakaran.

Sedangkan hal-hal dapat disarankan dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya efektifitas penerapan regulasi terkait dengan pemberian izin pembangunan sehingga memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan, (2) pengelolaan drainase sesuai dengan peraturan, (3) pengelolaan sampah yang baik, (4) pengelolaan sanitasi lingkungan serta (5) peningkatan fisik jalan. Dengan identifikasi dan langkah-langkah yang telah dirumuskan, maka permasalahan pemukiman kumuh di Desa Pengambengan dapat diatasi dan dapat dicegah terjadinya kondisi kumuh pada masa mendatang.

Selain itu juga perlu dilakukan penelitian dengan metode yang lainnya untuk mengidentifikasi kekumuhan di Desa Pengambengan sebagai pembanding, sehingga diperoleh hasil yang lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., & Novira, N. (2019). Analisis Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Medan Denai. *Tunas Geografi*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.24114/tgeo.v8i1.15453>
- Alfian, F., & Akbar, T. (2020). Upgrading Slum Area, Development and Hidden Inequality (Case Study: Kampung Warna-Warni and Kampung Tridi). *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 18(2), 70–79. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2020.018.02.6>
- Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosio religius*, 1(4), 52–60.
- Apriliani, D., Heldayani, E., Utomo, B., & Setianto, H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh di Kelurahan Tuan Kentang Kota Palembang. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 20(2), 73–84. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7>

- Ardani, I. A. (2022). *Karakteristik Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang* [Tugas Akhir]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Arief, A. S., Redin, H., & Amelia, V. (2021). Tingkat kekumuhan dan pola penanganan kawasan permukiman Murjani Bawah di Kota Palangka Raya. *Journal of Environment and Management*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.37304/jem.v2i1.2661>
- Asyfa, A., Ido, I., & Nurgiantoro, N. (2021). Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Pesisir Di Kecamatan Abeli. *JAGAT (Jurnal Geografi Aplikasi dan Teknologi)*, 5(2), 183. <https://doi.org/10.33772/jagat.v5i2.21625>
- BPS Kabupaten Jembrana. (2021). *Kecamatan Negara Dalam Angka 2021* (p. 149). Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana.
- Dimitra, S., & Yuliastuti, N. (2012). Potensi kampung nelayan sebagai modal permukiman berkelanjutan di Tambaklorok, kelurahan Tanjung Mas. *Jurnal Teknik PWK*, 1(1), 11–19.
- Elja, A., Rukmi, W. I., & Hasyim, A. W. (2023). Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan – Kabupaten Pamekasan. *Planning for Urban Region and Environment*, 12(2).
- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- Hadian, V. A., Maulida, D. A., & Faiz, A. (2022). Peran Lingkungan Keluarga dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Education and development*, 10(1), 240–246.
- Jaswadi, T., Andayani, L. S., & Rujiman. (2019). Analysis of The Level of Slum Area in Subulussalam City. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(2), 72–84. <https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.39>
- Kementerian PU. (2007). *Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan*. Kementerian PU, Jakarta.
- Kementerian PUPR. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018*. Kementerian PUPR, Jakarta.
- Kementerian PUPR. (2022). *Buku Saku – Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh*. Kementerian PUPR, Jakarta.
- Koterisa, J., Mononimbar, W., & Lahamendu, V. (2018). Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampera Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Spasial*, 5(2).
- Muhammad, M., & Yunus, L. (2018). Perencanaan Sistem Drainase Permukiman Kumuh di Kelurahan Lapulu Kota Kendari. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 3(2). <https://doi.org/2502-4205>
- Perkim.id. (2020). *Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Kabupaten/Kota*. Internet source URL <https://perkim.id/kerangka-acuan-kerja/penyusunan-rencana-pembangunan-dan-pengembangan-perumahan-dan-kawasan-permukiman-rp3kp-daerah-kabupaten-kota/>
- Putri, K., Ridlo, M. A., & Widayasmratri, H. (2023). Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909>
- Putung, D. T., & Perdana, Y. (2019). *Modul 1 Diklat Penyusunan RDTR Tingkat Dasar: Konsep Dasar RDTR dan Peraturan Zonasi*. PPSDM Kementerian ATR/BPN 2019.
- Shara, A. R. I. D. (2018). Analisis Kawasan Minapolitan di Desa Pengembangan. *Media Komunikasi Geografi*, 19(2), 194–201.
- Sudipa, I. G. I., & Sri Aryati, K. (2019). Pendekatan Penentuan Bobot dengan Surrogate Weighting Procedures untuk Metode Simple Additive Weighting dalam Pengambilan Keputusan Multikriteria. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 3(3), 113. <https://doi.org/10.23887/ijnse.v3i3.24146>
- Sunarto, & Pangestu, M. I. M. (2022). Analisis Daerah Kumuh Di Kelurahan Kampung Bugis Menggunakan Penilaian Kawasan Kumuh, ArcGis, Dan CarryMap. *Jurnal Inovasi Konstruksi*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.56911/jik.v1i2.14>
- Surya, B., Ruslan, M., & Abubakar, H. (2018). Inequility of Space Reproduction Control and Urban Slum Area Management Sustainability (Case Study: Slum Area of Buloa Urban Village in Makassar City). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 3(15).
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>